

ABSTRAK

UU Desa mengingatkan bahwa desa memiliki kewenangan otonom yang juga mendapat dana yang besar dari Pemerintah guna keberhasilan pembangunan yang mana juga memungkinkan terjadinya suatu penyelewangan. Hal tersebut bisa dihindari dengan mematuhi peraturan terkait keuangan desa. Karena saling terkaitnya prosedur dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa hendaknya melaksanakan tahap pertama dengan benar demi kelancaran tahap-tahap berikutnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya sinkronisasi antara RPJMD dan RPJM Desa serta RPJM Desa dengan dokumen perencanaan desa lainnya, harmonisasi antara Aparatur Desa dan BPD serta menunjukkan penerapan akuntabilitas pada tahap perencanaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan teknik analisis data Stake (1995) yakni: 1) Pengumpulan kategori; 2) Interpretasi langsung; 3) Pola; 4) Generalisasi naturalistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RPJM Desa sinkron dengan RPJMD Kabupaten, namun tidak sinkron dengan RKP Desa dan APBDes serta terjadi disharmonisasi para Aparatur Desa dalam melaksanakan tupoksinya, sehingga perencanaan keuangan desa masih belum dikatakan akuntabel sebab tidak berjalan sesuai UU Desa yang berlaku.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Harmonisasi, Akuntabilitas, Perencanaan keuangan desa.

ABSTRACT

The Village Laws reminds us that the village has an autonomous authority which also gets a large amount of funds from the Government for the success of development which also allows some deviations. Those can be avoided by complying village financial regulations. Due to the interrelated procedures in village financial management, the Village Government is carrying out the first stage correctly for the smoothness of the next stage. Therefore, this research aims to prove whether or not there is a synchronization between the RPJMD and RPJM Desa and RPJM Desa with other village planning documents, harmonization between the Village Apparatus and BPD and show the application of accountability at the village financial planning stage. This research uses a qualitative method with a case study approach that uses data techniques of Stake (2005), such as: 1) Categorical aggregation; 2) Direct Interpretation; 3) Pattern; 4) Naturalistic Generalization. The results of this study show that RPJM Desa is in sync with the RPJMD of Mojokerto District, but neither with RKP Desa and APBDes and also there is disharmonization among Village Apparatus in implementing their main tasks and functions, so that village financial planning is not accountable because it does not run according to applicable Village Law.

Keywords: Synchronization, Harmonization, Accountability, Village Financial Planning.